

**JARINGAN SOSIAL RAJO PENGHULU
DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL
(Sebagai Wujud Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 29 Tahun 2003)**

Oleh:

Yessilia Osira¹

ABSTRAKSI

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu merupakan salah satu dasar bagi Rajo Penghulu sebagai perwujudan lembaga adat di tingkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perdebatan tentang apakah aturan adat bisa dibuat formal atau hanya sekedar kesepakatan informal dalam masyarakat, semestinya tidak menjadikan Lembaga Adat Bengkulu surut dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan. Untuk itu, jaringan sosial Rajo Penghulu merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan.

Kata Kunci: *Jaringan Sosial, Lembaga Adat Bengkulu*

A. Pendahuluan

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan adat istiadat adalah bagian dari kebudayaan yang mewujudkan perilaku, sistem pergaulan, tata cara, adab sopan santun dan pelestarian budaya leluhur. Berbagai aspek yang melekat padanya, seperti; kesenian, keterampilan, etika, dan estetik, memberi corak dan nilai tambah kepada seni budaya. Mendorong kita sebagai bangsa Indonesia khususnya masyarakat Bengkulu untuk memelihara dan mengembangkan aset budaya yang bernilai.

Sebagai amanat peraturan daerah tersebut, maka dibentuklah Lembaga Adat, yaitu kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan hukum adat Kota Bengkulu. Lembaga Adat ini meliputi Rajo Penghulu di Kelurahan, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan yang berada di kecamatan, dan BMA Kota yang berada di tingkat Kota Bengkulu (Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Bab I pasal 2).

Penelitian Yessilia Osira dkk (2012) menyatakan bahwa Rajo Penghulu, sebagai merupakan perwujudan dari Lembaga Adat

Bengkulu yang berada di tingkat kelurahan pada dasarnya merupakan suatu kelembagaan sosial yang mempunyai peranan dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan seperti penanganan masalah tuna susila, pencurian, perselisihan warga, bahkan pembunuhan. Dalam rentang kerja lembaga adat sebelum pemberlakuan peraturan daerah tentang pemberlakuan adat tersebut sampai sekarang, Rajo Penghulu di Kelurahan Rawa Makmur Permai banyak mengalami hambatan seperti: 1) kurangnya sosialisasi keberadaan lembaga adat kepada masyarakat, 2) kurangnya kegiatan pengembangan kapasitas bagi pengurus adat, 3) kurangnya pencatatan atas permasalahan warga yang ditangani.

Setiap kelembagaan sosial terdiri atas elemen pembentuknya yang saling berhubungan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan utuh yang terikat melalui suatu jaringan sosial. Menurut David A. Hardcastle "Social networks are social arrangements of people, groups, organizations, or other social units that interact and engage in exchanges to achieve their purposes (2004). Secara sederhana, jaringan sosial sebenarnya merupakan salah satu bentuk strategi dan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun

¹ Dosen Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu

masyarakat dalam menghadapi lingkungan pekerjaannya yang tidak menentu atau diliputi oleh berbagai keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Berkaitan dengan pengertian tersebut, Rajo Penghulu pun sangat membutuhkan individu, kelompok atau masyarakat lain, sebagai suatu strategi bagi pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan yang dihadapi, termasuk dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

Atas dasar tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada “Bagaimana Jaringan Sosial Rajo Penghulu dalam Penanganan Masalah Sosial sebagai Perwujudan Implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang jaringan sosial Rajo Penghulu Kelurahan Rawa Makmur Permai dalam penanganan masalah sosial. Melalui penelitian ini, diharapkan Lembaga Adat Bengkulu, khususnya Rajo Penghulu dapat mengembangkan jaringan sosialnya sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya optimal.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui secara detail dan mendalam tentang jejaring sosial Rajo Penghulu kelurahan Rawa Makmur Permai dalam penanganan masalah sosial. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada latar alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan

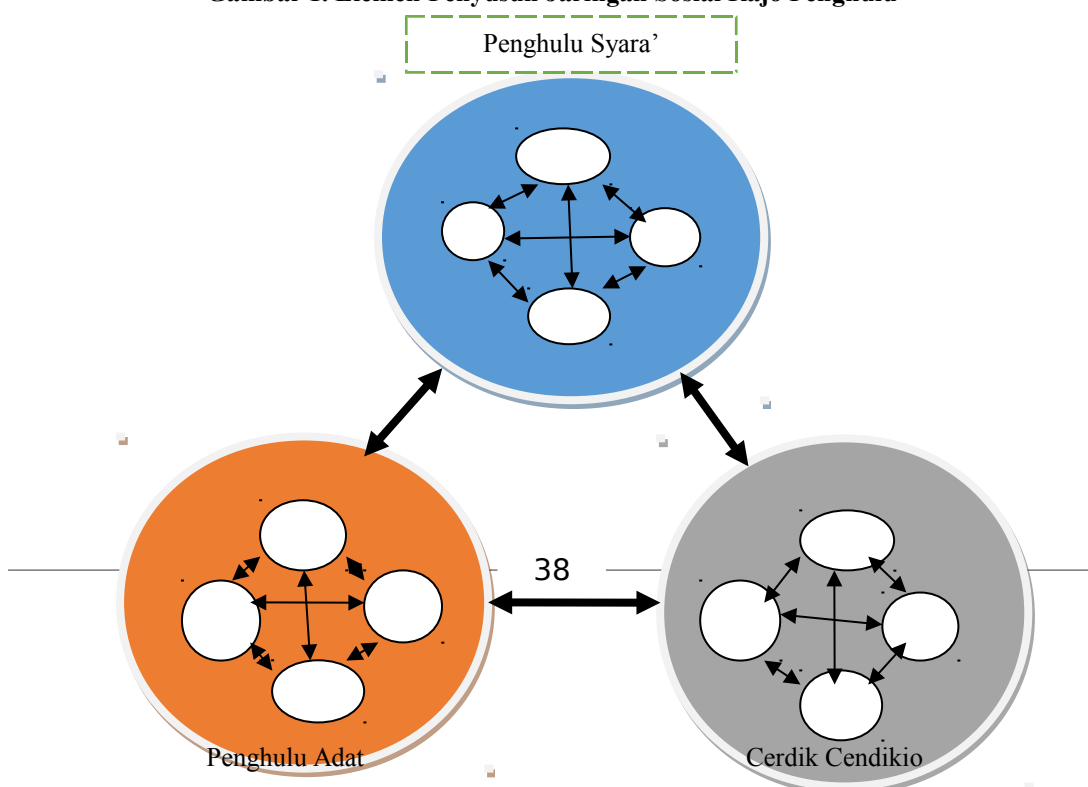
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono : 2008).

Dalam penelitian ini data primer tentang jaringan sosial dalam penanganan masalah sosial didapatkan melalui wawancara, observasi dan focus group discussion (FGD) dengan pengurus Rajo Penghulu Kelurahan Rawa Makmur Permai, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi dokumentasi yang berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan tentang lembaga adat Bengkulu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rajo Penghulu Kelurahan Rawa Makmur Permai terdiri dari elemen Penghulu Adat, Penghulu Syara', dan Cerdik Cendikio. Ketiga elemen Rajo Penghulu tersebut juga terdiri dari elemen-elemen berupa orang-orang awalnya dipilih oleh perwakilan masyarakat dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota Bengkulu. Dengan demikian Rajo Penghulu pun sebenarnya merupakan jaringan sosial yang tersusun atas Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendikio. Masing masing elemen tersebut juga merupakan jaringan sosial yang tersusun atas orang-orang yang ditunjuk oleh masyarakat untuk menjalankan amanat sebagai Rajo Penghulu. Dapat dikatakan hal tersebut merupakan jaringan internal Rajo Penghulu, yang lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Elemen Penyusun Jaringan Sosial Rajo Penghulu



Keterangan:



: elemen-elemen jaringan sosial berupa orang-orang yang dipilih dan ditetapkan baik sebagai penghulu adat, penghulu syara' maupun sebagai cerdik cendikio. Pada umumnya mereka merupakan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah tersebut.



: pola hubungan sosial antar elemen

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015

Jaringan-jaringan hubungan yang terbentuk dalam kelembagaan Rajo Penghulu tersebut menjadi penting karena keberfungsian Rajo Penghulu sangat tergantung pada bagaimana pengelolaan hubungan sosial diantara elemen-elemen tersebut yang telah diatur dalam tugas dan fungsi masing-masing elemen.

Penelitian Yessilia Osira dkk (2012) menyebutkan, bahwa berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003, keteraturan jaringan sosial internal Rajo Penghulu diikat oleh tugas dan fungsi Rajo Penghulu sebagai berikut:

Matrik 1. Tugas dan Fungsi Rajo Penghulu

Tugas Pokok Rajo Penghulu	<ul style="list-style-type: none">• Membina dan memelihara pelaksanaan hukum adat di kelurahan Kota Bengkulu• Sebagai penghubung masyarakat adat dengan BMA Kecamatan• Sebagai mitra utama Lurah
Fungsi Rajo Penghulu	<ul style="list-style-type: none">• Mencegah terjadinya pelanggaran hukum adat (Dapek Salah) yang menyebabkan terjadinya Denda Adat• Mendorong anggota masyarakat untuk secara bersama-sama pegang pakei adat• Menyelesaikan Dapek Salah secara arif, patut dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum adat• Memelihara keseimbangan antara kemajuan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat adat.

Sumber: Hasil penelitian Yessilia Osira dkk tahun 2012

Berkaitan dengan keteraturan jaringan sosial, Mitchell (1969) membagi tiga tipe keteraturan dalam jaringan meliputi keteraturan struktural, keteraturan kategorikal dan keteraturan personal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, merujuk pada tipe keteraturan Mitchell tersebut, maka jaringan elemen Rajo Penghulu dapat dikategorikan pada tipe keteraturan structural karena tugas dan fungsi komponen-komponen dalam Rajo Penghulu

tersebut diatur secara rinci berdasarkan peraturan daerah Kota Bengkulu.

Keteraturan dalam jaringan sosial berimplikasi pada pembentukan struktur sosial. Struktur sosial dapat didefinisikan sebagai pola tentang hak dan kewajiban para pelaku dalam suatu sistem interaksi yang terwujud dari rangkaian-rangkaian hubungan sosial yang relative stabil dalam suatu jangka waktu tertentu. Pengertian hak dan kewajiban para pelaku dikaitkan dengan

status dan peranan masing-masing. Dalam konteks hak dan kewajiban tersebut, baik tertulis maupun hanya tersirat, ada hak dan kewajiban Rajo Penghulu dalam penanganan masalah sosial.

Mitchell (1969) mempersyaratkan bahwa kekuatan jaringan dipengaruhi oleh resiprositas, intensitas, dan durabilitas hubungan antar pihak. Hasil penelitian menunjukkan kurang optimalnya jaringan internal di dalam Rajo Penghulu. Hal ini ditandai dengan tidak adanya komunikasi dan koordinasi secara sistematis antara Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendikio untuk membahas pelaksanaan tugas dan fungsinya beserta permasalahan yang dihadapinya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bpk Mahyudi Alwi (ketua penghulu adat)..... “

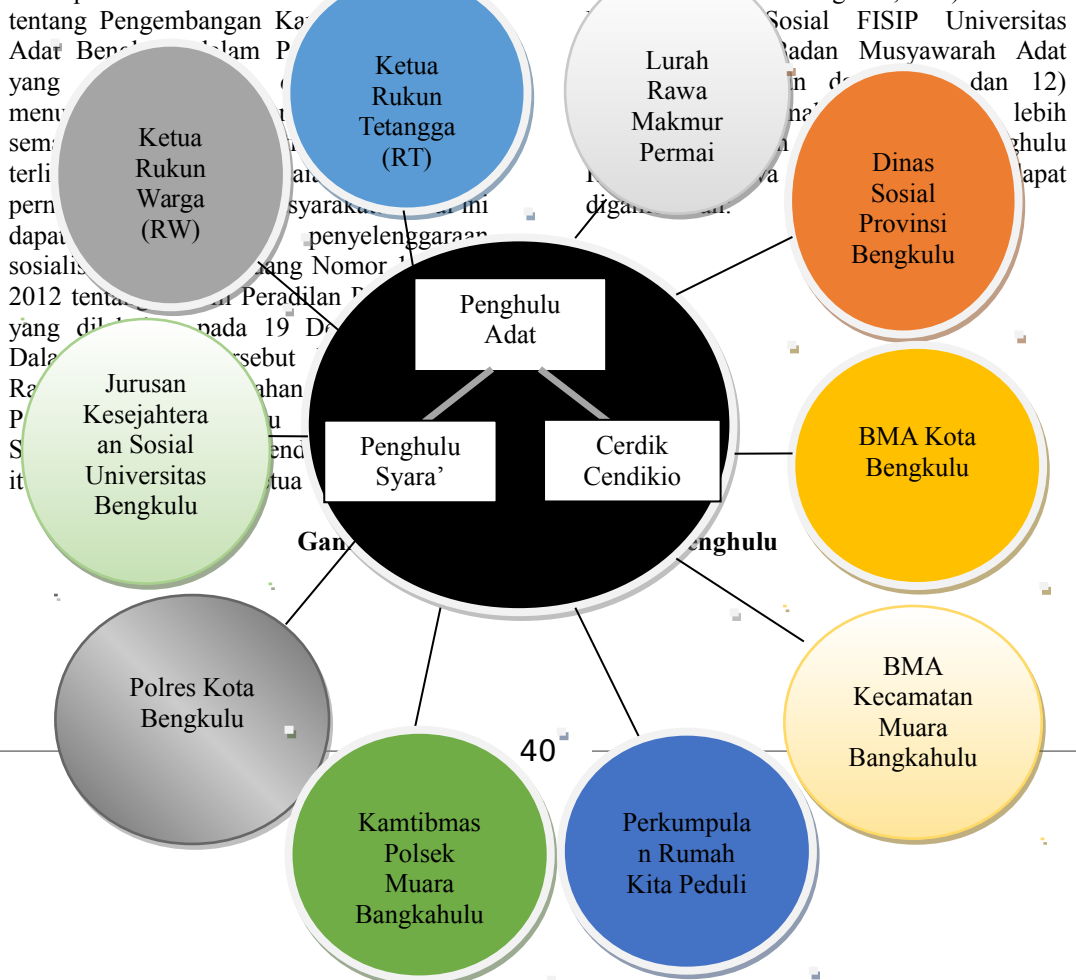
Sejak terbentuk dan di SK kan walikota dulu, kami tu idak ado pembinaan yang rutin, bahkan pertemuan antaro penghulu adat, penghulu syara' dan cerdik cendikio juga terjadi karena pertemuan informal karena sama-sama jamaah masjid, tetapi tidak ada secara khusus membahas tentang pelaksanaan lembaga adat maupun pembahasan tentang peranan adat dalam menangani masalah sosial.....”

Meskipun secara internal, hubungan sosial antara elemen penyusun Rajo Penghulu tidak optimal, tetapi merujuk pada hasil penelitian Yessilia Osir (2015) tentang Pengembangan Ka

Kelurahan Rawa Makmur Permai, kamtibmas, dan tokoh masyarakat. Bertindak sebagai narasumber adalah: 1) Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu yang menyampaikan materi tentang Peranan Lembaga Adat Dalam Penanganan Masalah Sosial, 2) Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, di wakili oleh Pekerja Sosial, yang menyampaikan materi tentang Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum, 3) Kasat Reskrim Polres Bengkulu yang menyampaikan materi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kegiatan yang digagas oleh Ketua Penghulu Adat Kelurahan Rawa Makmur Permai bersama peneliti dari Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu tersebut menunjukkan adanya kerja sama yang dilakukan oleh elemen-elemen internal Rajo Penghulu dengan elemen-elemen eksternal pada akhirnya membentuk jaringan sosial Rajo Penghulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kegiatan tersebut, jaringan sosial Rajo Penghulu Kelurahan Rawa Makmur Permai terdiri dari:1) Penghulu Adat, 2) Penghulu Syara', 3) Cerdik Cendikio, 4) Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Rawa Makmur Permai, 5) RW di Kelurahan Rawa Makmur Permai, 6) Lurah Rawa Makmur Permai, 7) Kamtibmas Polsek Muara Bangkahulu, 8) Polres Bengkulu, 9) Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 10) Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu, 11) Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, dan 12) Perkumpulan Rumah Kita Peduli.



Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komponen jaringan sosial Rajo Penghulu, berupa aktor individu seperti Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Kamtibmas, dan aktor kelompok maupun masyarakat seperti Perkumpulan Rumah Kita Peduli, BMA Kota, BMA Kecamatan, Dinas Sosial, Polres dll., kelompok dan masyarakat. Konteks ini menunjukkan bahwa hubungan dapat saja terjadi ditingkat struktur sosial skala luas maupun tingkat yang lebih mikroskopik sebagaimana elemen penyusun Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendikio yang terdiri dari orang perorangan tokoh-tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, apabila ditinjau dari tujuan hubungan sosial yang membentuk jaringan-jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, merujuk pada pendapat Agusyanto (1997:26-28), maka jenis jaringan sosial Rajo Penghulu Kelurahan Rawa makmur Permai dapat dibedakan menjadi: 1) **Jaringan interest** (jaringan kepentingan), dimana hubungan-hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan-hubungan sosial yang bermuatan

kepentingan. Jaringan ini terbentuk oleh hubungan-hubungan yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu. Struktur yang muncul dari jaringan ini, sebentar dan berubah-ubah bila tujuan sudah dicapai karena tujuan bersifat spesifik dan konkret. Elemen penyusun jaringan ini misalnya Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu karena berkepentingan dengan proses penelitian, Perkumpulan Rumah Kita Peduli karena berkaitan dengan proses pengembangan kapasitas kelembagaan, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Polres Kota Bengkulu, Kamtibmas Polsek Muara Bangkahulu karena keterkaitan dengan program penanganan masalah anak berhadapan dengan hukum, dan komponen Ketua RT-RW dan Lurah karena berkaitan dengan warganya 2) **Jaringan sentiment** (jaringan emosi), yang terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang bermuatan emosi, dan hubungan tersebut sendiri menjadi tujuan dan tindakan sosial. Struktur yang dibentuk oleh hubungan perasaan ini cenderung mantap dan permanen. Komponen penyusun

jaringan sosial ini dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya BMA Kecamatan, dan BMA Kota Bengkulu. Hal ini terjadi karena adanya perasaan “senasib” sama-sama berposisi dan berperan sebagai lembaga adat. 3) **Jaringan power** (kekuasaan), dimana hubungan-hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan-hubungan sosial yang bermuatan power. Dalam jaringan kekuasaan, konfigurasi-konfigurasi saling keterkaitan antar pelaku di dalamnya disengaja atau diatur oleh kekuasaan. Tipe jaringan ini muncul bila pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditargetkan membutuhkan tindakan kolektif dan konfigurasi saling keterhubungan antar pelaku yang biasanya bersifat permanen. Unit-unit sosialnya adalah artificial yang direncanakan atau distrukturkan secara sengaja oleh kekuasaan. Jaringan sosial tipe ini mempunyai pusat kekuasaan yang secara terus menerus mengkaji ulang kinerja unit-unit sosialnya, dan mempolakan kembali strukturnya untuk kepentingan efisiensi. Dalam hal ini control informal tidak memadai, masalahnya jaringan sosial ini lebih kompleks dibandingkan jaringan sosial yang terbentuk secara alamiah. Jaringan sosial ini tidak dapat menyandarkan diri pada kesadaran para anggotanya untuk memenuhi kewajiban anggotanya secara sukarela, tanpa insentif. Pada dasarnya Lembaga Adat Bengkulu, dalam hal ini Rajo Penghulu mempunyai tingkat independensi yang tinggi karena merupakan lembaga yang mandiri, tidak berada pada sub ordinasi lembaga-lembaga lain. Namun demikian, jaringan kekuasaan juga dapat kita temukan dalam lembaga adat, yaitu komponen Rajo Penghulu, BMA Kecamatan dan BMA Kota. Yang Jaringan kekuasaan terjadi karena apabila Rajo Penghulu tidak bisa menangani suatu permasalahan, maka itu menjadi tanggung jawab BMA Kecamatan, dan bila tidak mampu juga maka harus ditangani oleh BMA Kota. Dengan demikian sudah terjadi pembagian kewenangan yang menunjukkan adanya jaringan kekuasaan.

Salah satu konsekuensi pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003, adalah adanya pembinaan dari pemerintah terhadap keberadaan Lembaga Adat Bengkulu, dan itu bisa dimanifestasikan dalam bentuk penganggaran bagi operasional lembaga adat, maupun insentif bagi pengurus lembaga adat. Hasil penelitian

ini menunjukkan konsekuensi tersebut belum dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bengkulu.

G. Penutup

Pengembangan jaringan sosial perlu dilakukan karena tidak semua lembaga sosial termasuk Rajo Penghulu Kelurahan Rawa Makmur Permai mampu memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalahnya sendiri, sehingga perlu mengakses sumber-sumber dan menjalin kemitraan dengan lembaga atau organisasi lainnya. Tujuan dilakukannya pengembangan jaringan sosial yaitu agar Rajo Penghulu dapat mengkombinasikan fungsi-fungsi yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan, melalui pertukaran informasi, pengalaman, pengetahuan serta penyediaan sumber-sumber yang berasal dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga sehingga dapat meningkatkan keberdayaan Lembaga Adat Bengkulu.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu semestinya senantiasa dimonitoring dan dievaluasi baik oleh pemerintah Kota Bengkulu maupun oleh masyarakat luas termasuk organisasi sosial sehingga keberadaan peraturan daerah tersebut menjadi modal yang kuat bagi meningkatnya peranan Lembaga Adat Bengkulu dalam penanganan masalah sosial di wilayah Bengkulu

*Dalam Penanganan Masalah Sosial,
Perkumpulan Rumah Kita Peduli*

DAFTAR PUSTAKA

- David A. Hardcastle, Patricia R. Powers, Stanley Wenocur, 2004, *Community Practice: Theories and Skill for Social Worker*, Second edition, Oxford University Press
- Mitchel J Clyde, 1969, *Social Networks in Urban Situations, Analyses of personal relationship ini central African Towns*, published for the institute of african studies, University of Zambia, Manchester University Press.
- Neuman, W. L. (2000), *Social Research Methods ; Quantitative and Qualitative Approuches, Fourth Edition*, USA : A Pearson Education Company.
- Ruddy Agusyanto, (2007), *Jaringan Sosial dalam Organisasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- Suwarsih Madya, Prof., Ph.D. (2007). *Teori dan Praktek Penelitian Tindakan (Action Research)*. Bandung : Alfabeta.
- Zuriah, N (2003), *Penelitian Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial*, Malang : Bayumedia Publising.
- Yessilia Osira, Syuplahan Gumay, Cucu Syamsudin, 2012, *Peranan Lembaga Adat Bengkulu dalam Penanganan Masalah Sosial (Studi Kasus di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)*, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya AKSES Vol.11 No.1 Hal 81-94 Edisi Februari 2014. ISSN : 1693-8356
- Yessilia Osira, Alex Abdu Chalik, Muria Herlina, Novi Hendrika Jaya Putra, 2015, *Laporan Penelitian :Pengembangan Kapasitas Lembaga Adat Bengkulu Dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. LPPM Universitas Bengkulu.
- Yessilia Osira, 2015, *Laporan Penelitian: Jaringan Sosial Rajo Penghulu Kelurahan Rawa Makmur Permai*